BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil perusahaan

Nama Instansi : Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bandung

Alamat Instansi : Jl. Surapati No.122 Bandung

Telepon : (022) 7203806

Fax : (022) 7273605

Website : http://jabar.bkkbn.go.id/

2.1.1 Sejarah Perusahaan

Pada akhir tahun 1960-an ada dua tahap pembentukan program keluarga berencana nasional. Pertama, tahun 1968 Presidon Soeharto mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap implementasi program penyediaan kontrasepsi kepada penduduk.

Pada awalanya, hal ini menempatkan pemerintah dan PKBI yang swasta dalam situasi pertentangan. Di satu pihak, relawan yang telah berjuang melawan

penolakan dalam beberapa tahun menganggap diri mereka terpinggirkan untuk membuka pelayanan pengendalian kelahiran secara bebas. Di pihak lain, pegawai pemerintah dengan sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali di lapangan di beri tanggungjawab untuk mengembangkan program nasional.

Rasa frustasi PKBI tersebut menurut atan Hull tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun 1969. Dalam laporan tersebut kehebohan yang terjadi pada tahun 1967 dalam kongres nasional pertama pada bulan februari telah tercatat, dalam hal ini delegasi dari delapan perwakilan berkumpul untuk mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 52 klinik yang mereka kelola, tetapi dalam kenyataannya melalui prestasi-prestasi yang telah di capai pada tahun itu saja telah terjadi kenaikan jumlah perwakilan maupun jumlah klinik yang mereka kelola menjadi lebih dari dua kali lipat. Tahun 1968 PKBI mengelola 215 klinik di seluruh Indonesia. Nasionalisasi program mulai juli 1969 ketika, berdasarkan kesepakatan kerja sama dengan mentri kesehatan. PKBI menangani semua klinik tersebut, perlengkapan dan persediaan di Jawa dan Bali dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan kabupaten, sebagaian besar didana USAID. PKBI terus bertanggungjawab di bidang pelatihan dan penelitian, namun belum jelas bagaimana prioritas dari kegiatan-kegiatan ini di atur. Baik PKBI, LKBN maupun mentri klesehatan mempunyai gagasan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya arah program diatur.

Tahap kedua dan sangat penting dalam pengembangan program nasional terjadi bulan Februari 1970, ketika presiden memutuskan bahwa LKBN diganti menjadi BKKBN. Kata kunci dengan nama baru ini adalah “koordinasi”, dan hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa keluarga berencana tidak dapat

diimplementasikan oleh satu badan saja, tetapi harus melibatkan kontribusi dan departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen penerangan, departemen agama, dan departemen dalam negri. Juga berbagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini. Dari awal BKKBN berjalan diwilayah yang rumit dan kompleks. Organisasi ini bertindak baik sebagai pelaksana maupun coordinator, mengajak kerja sama dengan badan lain untuk bergabung dengan upaya mereka, namun semakin jelas bahwa sebagai badan yang secara langsung melaporkan kepada presiden, hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan pusat harus diikuti. Tahun 1960-an dapat dikatakan sebagai tahun-tahun penuh liku-liku bagi program keluarga berencana, namun sebagai awal dari tahun pertama dasawarsa baru, para pemimpin sangat antusias dengan prospeknya di masa depan.

Pada awal mulanya pendataan data keluarga di BKKBN masih secara manual dengan mengisi form Register Pendataan keluarga, namun pada tahun 2010 sistem yang awal mulanya masih secara manual sudah terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi MDK (Pemutakhiran Data Keluarga). Dimana MDK itu sendiri merupakan aplikasi yang masih di pakai hingga saat ini.

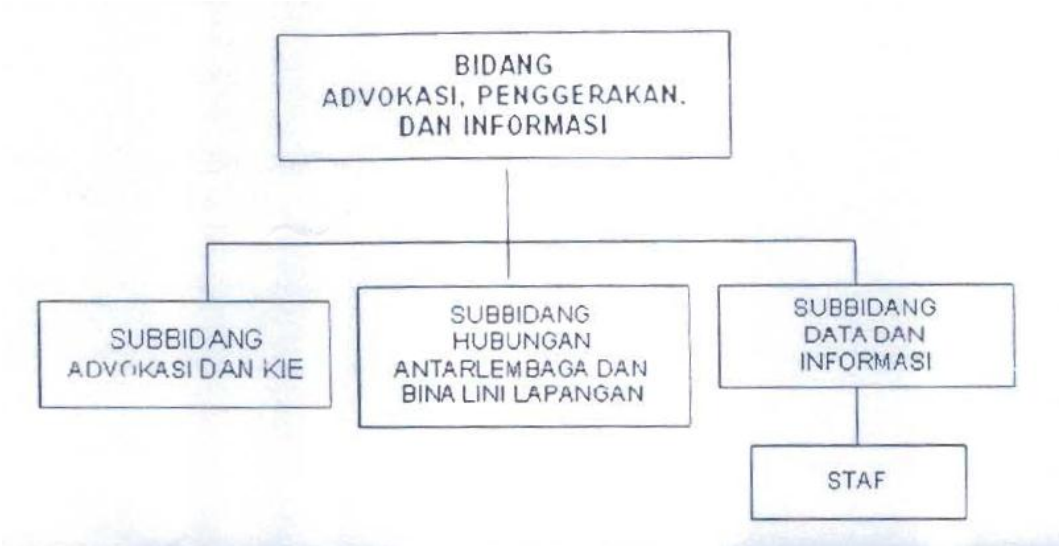
Visi :

Penduduk tumbuh seimbang tahun 2015

Misi :

Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

2.1.2 Stuktur Organisasi BKKBN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKKBN

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

2.1.3.1 Tugas Pokok

Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

2.1.3.2 Fungsi Jabatan

Tabel 2.1 Fungsi Jabatan

Jabatan	Fungsi
Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi / BKKBN	Menyampaikan laporan dan konsultasi
Seluruh Kepala Subbidang di BKKBN provinsi dan pusat/BKKBN	Mengkoordinasikan staf-staf yang ada di bidangnya masing-masing
Staf Subbidang Data dan Informasi/BKKBN	Menerima pembinaan dan pengarahan kerja dari atasan dan meminta data, informasi atau konfirmasi.

Sumber : Berkas Uraian Pekerjaan Data Informasi

2.1.5 Logo Instansi



Gambar 2.2 Logo Instansi Umum

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian MySQL

MySQL adalah *multiuser database* yang menggunakan bahasa pemrograman Structured Query Language (SQL). Sedangkan SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses *database server*. (Abdul Kadir, 2009:300)

2.2.2 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa skrip (bahasa yang kodenya ditulis menggunakan teks biasa) yang ditempel pada dokumen HTML dan diproses pada sisi klien.(Abdul Kadir, 2009:8)

2.2.3 Pengertian HTML

HTML adalah bahasa dengan tanda-tanda khusus yang digunakan di awal era Web untuk menyajikan informasi.(Abdul Kadir, 2009:12)

2.2.4 Pengertian AJAX

AJAX (*Asyncronous JavaScript and XML*) merupakan suatu teknik yang memungkinkan untuk membuat aplikasi web yang interaktif. Dengan menggunakan Ajax, aplikasi web dapat berinteraksi dengan server di latar belakang sehingga tidak mempengaruhi halaman web secara keseluruhan.(Abdul Kadir, 2009:2)

2.2.5 Pengertian PHP

PHP adalah skrip yang dijalankan di server. Keuntungan penggunaan PHP, kode yang menyusun program tidak perlu dibagikan ke pemakai, yang berarti bahwa kerahasiaan kode dapat dilindungi.(Abdul Kadir, 2009:246).

2.2.6 Pengertian Sistem

Sistem menurut buku analis desain dan informasi dapat dilihat dari dua kelompok pendekatan yaitu yang menekankan pada prosedur dan yang menekankan pada komponen atau elemennya.

1. Berdasarkan Penekanan Prosedur

   Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. (Jogiyanto, H:M, 1991:1)

2. Berdasarkan Penekanan Komponen

   Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 1999:2)

2.2.7 Pengertian Informasi

Menurut Jogiyanto (1999:8) Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang digunakan untuk

pengambilan keputusan. Sumber dari inormasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.

2.2.8 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manejerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.